



RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH 2025

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN
2024**

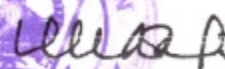


KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kinerja Tahunan atau Rancangan Akhir RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kinerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rancangan Akhir Rencana Kinerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada, diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk secara bersama-sama berperan aktif seta berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tabanan, 28 Juni 2024
INSPEKTUR KABUPATEN
TABANAN

Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 19661030 198610 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	22
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	30
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	38
BAB V PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan *legitimate* merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bersih (*Clean Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Salah satu perencanaannya Perangkat Daerah yang wajib disusun setiap tahun adalah Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Hal ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, dimana dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja harus memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indicator dan pendanaan serta rancangan awalnya telah dibuat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan,

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025, adalah:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- (3). Landasan Operasional :



1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
 15. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020. Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14).
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);

32. Perda Kabupaten Tabanan No 11 tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.



2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten daerah Tabanan Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan dari pada penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan prakiraan



capaian tahun berjalan (2024), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BabIII Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menjelaskan penelahaan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Disamping itu juga memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Bab IV Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan pengertian Rencana Program yaitu Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab.V Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Governance*) maka perlu diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang terukur melalui penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik dan terukur. Penilaian perencanaan dan pelaporan yang terukur dilakukan melalui evaluasi rencana kerja.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah guna tercapainya visi Kabupaten Tabanan, melalui beberapa program maupun kegiatan.

Mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 sebagaimana tertera pada Tabel 2.1., bahwa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan terdapat 3 (tiga) program, dengan 11 (Sebelas) kegiatan. Adapun rincian capaian target kinerja pada tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

- A. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan
 - 1. Program yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:



Pada tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan terdapat 3 (tiga) program, dimana tidak ada program yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

B. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

1. Program yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dimana realisasinya sesuai dengan target yaitu 100%
2. Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - g. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
 - h. Pendampingan dan Asistensi.

Semua kegiatan tersebut realisasinya sesuai dengan target yaitu 100%

C. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

1. Program yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana targetnya 100% sedangkan realisasinya mencapai 130%.



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana targetnya 100% sedangkan realisasinya mencapai 130%.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi mencapai 340% dari target 100%.
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Internal realisasi mencapai 191,75 % dari target 100%.
- D. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhnya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
 1. Faktor penyebab tidak terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan
Pada tahun ini tidak ada target yang tidak terpenuhi.
 2. Faktor penyebab Target Kinerja Program/Kegiatan Melebihi Target.
Realisasi target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melebihi target disebabkan oleh:
 - a. Beberapa kegiatan pendukungnya realisasi target kinerjanya sesuai dengan yang ditargetkan, adapun kegiatan tersebut:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi target kinerja mencapai 340%
 - c. Anggaran sub-sub kegiatan memadai



E. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai akibat tidak tercapainya target kinerja tersebut, maka berdampak terhadap tidak tercapainya capaian program dari Rencana Strategis baik itu capaian program tahun 2023 maupun terhadap capaian program diakhir periode Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan.

G. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut.

Kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Dari segi penganggaran, selain mengupayakan peningkatan anggaran dari APBD Kabupaten Tabanan dimana saat ini baru terpenuhi 0,70% dari target 1%, juga yang perlu dilakukan adalah melaksanakan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (BPKP dan BPK) agar memperoleh dukungan pendanaan khususnya bimbingan teknis bagi pejabat fungsional Disamping itu, melaksanakan skala prioritas penganggaran juga harus dilakukan.
2. Dari segi perencanaan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan reviu terhadap Rencana Strategis dimana Program/Kegiatan yang kurang strategis atau tidak mendukung pencapaian target kinerja kiranya perlu dihilangkan. Demikian pula halnya perlu ada penambahan Program/Kegiatan baru yang mendukung pencapaian target kinerja.



Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2023 (Renstra 2021 – 2026)

KODE				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2024	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
1				2	3	4	5	TARGET RENJA TAHUN 2023	REALISASI RENJA TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	9	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
								6	7	8		10	11
										=(7/6)		=(5+7+9)	=(10/4)
1	01			Inspektort									
				I. RENSTRA 2021- 2026									
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	100%	95%	100%	101,90%	101,90	100%	108%	108
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	10 Dok	2 Dok	2 Dok	2	100	2 Dok	6 Dok	60
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 Dok	3 Dok	3 Dok	3	100	3 Dok	9 Dok	60



			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	0	2 Dok	40
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	113,33%	113,33	100%	180%	180
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	100%	100%	100%	113,33%	113,33%	100%	100%	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Bahan Logistik	Persentase								



Kabupaten Tabanan

			Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	100%	0	100%	0	0	100%	33,33%	33,33
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Pengadaan Peralatan dan	Persentase Pengadaan								



Kabupaten Tabanan

			Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	0	66,67%	66,67
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	66,67%	100%	66,67%	66,67	100%	77,78%	77,78
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100



				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dn bangunan lainnya	yang I pelihara	100%	0	100%	0	0	100%	33,33%	33,33
			02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN	100%	100%	100%	193,75%	193,75	100%	46,5%	46
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	191,67%	191,67	100	46,1%	46,1
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 LHP	4 LHP	7 LHP	14 LHP	200	4 LHP	51 LHP	87
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah	12 LHP	12 LHP	12 LHP	36 LHP	300	12 LHP	42 LHP	65
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 LHP	3 LHP	3 LHP	3 LHP	100	3 LHP	8 LHP	26
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 LHP	4 LHP	4 LHP	10 LHP	250	4 LHP	12 LHP	66
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan Desa	12 LHP	12 LHP	6 LHP	12 LHP	200	12 LHP	34 LHP	65



Kabupaten Tabanan

			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk		0	1	1	1	0	0	0
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	12 LHP	12 LHP	12 LHP	12 LHP	100	12 LHP	36 LHP	62
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	150%	150	100%	50%	50
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	10	0	2 LHP	2 LHP	100	2 LHP	2	20
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 LHP	12 LHP	3 LHP	6 LHP	100	6 LHP	24 LHP	80
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PRSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DI LAKSANAKAN	100%	100%	100%	100%	100	100%	80%	80
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	0	100%	100%	100	100%	60%	60
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	10 Dokumen	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60



Kabupaten Tabanan

				Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	90%	90
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian, Reformasi Birokrasi urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi pengakuan integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survei penilaian integritas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Pengawasan yang merupakan sebagai fungsi dari Inspektorat memiliki tugas yang penting untuk mengawal pencapaian tujuan pembangunan. Hal yang paling krusial adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya memberikan nasihat dan mengawal pelaksanaan program prioritas agar tidak menyalahi aturan sehingga para pelaksana tidak mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada pasal 1 point 12 menyebutkan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak. Dan sudah tentu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini perlu dilakukan evaluasi guna mencapai pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui analisa kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator yang ditetapkan. Adapun indikator kinerja sasaran yang menjadi tolok ukur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah **"Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Memenuhi SAP"**. Penetapan indikator ini melalui pemahaman visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani (AUM), dan pendalaman misi khususnya Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023 realisasinya sesuai target yaitu 100%. Gambaran secara rinci tentang evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023 untuk indikator kinerja utama disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

N O	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Proyeksi				Capaian Analisis
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	-	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100	100	Realisasi capaian sesuai dengan target tidak terlepas dari dukungan anggaran yang memadai



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Paradigma Inspektorat tidak lagi menjadi *watchdog* tetapi sebaga *catalyst* yang menjalankan fungsi sebagai *quality assurance* dan *consulting* dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance*, maka aktivitas pengawasan intern yang dilakukan meliputi:

- Pemantauan;
- Evaluasi;
- Reviu; dan
- Audit.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi sebagai *consulting*, maka aktivitas pengawasan internnya meliputi:

- Sosialisasi;
- Asistensi; dan
- Bimbingan Teknis.

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP A menjadi suatu keharusan dalam opini laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan. Untuk mencapai opini WTP penerapan manajemen resiko dan maturitas resiko menjadi suatu keharusan. Untuk mencapai nilai SAKIP A melalui peningkatan evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:



1. Pengawasan yang berbasis kinerja belum optimal.
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas APIP

Isue-isue tersebut dituangkan dalam suatu program dan kegiatan yang inovatif, aplikatif serta sesuai dengan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sehingga mampu mencapai misi “Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)” dan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul Madani (AUM)”.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dalam rancangan akhir rencana kerja tahun 2025, merupakan kesepakatan dalam Forum Perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten. Adapun usulan tersebut disajikan pada tabel berikut 2.4.:



Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
6	01				Inspektorat			25.493.302.400,00
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerahkabupaten/Kota	Kab. Tabanan,	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100% 24.435.462.400,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan,	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100% 5.000.000,00
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dok 3.000.000,00
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dok 2.000.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100% 21.521.421.600,00
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100% 21.521.421.600,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Presentase SDM yang bersertifikat	100% 1.100.000.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tabanan	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	100%	1.100.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	478.010.800,00
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabanan	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100%	5.000.000,00
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100%	18.000.000,00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	100%	50.000.000,00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	1 Paket	110.000.000,00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100%	11.000.000,00
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	100%	173.010.800,00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	100%	110.000.000,00
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	100%	12.000.000,00
6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	600.000.000,00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan	Kab. Tabanan	100%	600.000.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	280.200.000,00
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	15.000.000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	60.200.000,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	205.000.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	450.830.000,00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	100%	400.000.000,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	100%	50.830.000,00
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Tabanan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan		717.840.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	547.840.000,00
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	4 LHP	87.040.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	12 LHP	130.560.000,00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	3 LHP	43.520.000,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	4 LHP	65.280.000,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	12 LHP	130.560.000,00
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen kesepakatan		90.880.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	12 LHP	21.760.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	170.000.000,00
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	2 Dok	100.000.000,00
6	01	02	2.02	02	Penanganan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	6 LHP	70.000.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	100%	340.000.000,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000,00
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	2 Dok	15.000.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	325.000.000,00
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan/asistensi	100%	80.000.000,00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tabanan	Jumlah perangkat daeran yang dievaluasi	100%	45.000.000,00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tabanan	Jumlah laporan verifikasi rencana aksi	100%	200.000.000,00



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti diketahui bahwa Visi dari Pemerintahan Presiden Republik Indonesia adalah: Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan salah satu Misinya adalah Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

A. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomoer 15 Tahun 2006 dengan bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan tata kelola keuangan negara agar berkualitas dan bermanfaat mempunyai visi :

MENJADI LEMBAGA PEMERIKSA TERPERCAYA YANG
BERPERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN
NEGARA YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT
UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA

Sedangkan misi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan Negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan.
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.



B. Visi dan Misi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 merupakan dasar hukum dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun visi dari BPKP adalah :

MENJADI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH BERKELAS DUNIA
DAN *TRUSTED ADVISOR* PEMERINTAH UNTUK MENINGKATAKN
GOOD COVERNANCE SEKTOR PUBLIK

Sedangkan misi dari BPKP meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membanguna sumber daya pengawasan yang berkualitas

3.2. Tinjauan Terhadap RPJMD-SB Kabupaten Tabanan

A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Tinjauan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 dilakukan karena Rencana Kerja merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah:

**Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta
Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman
Unggul Madan (AUM)**

Sedangkan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

**Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan
Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)**

B. Asta Program

Asta Program merupakan prinsip yang mendasari pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka



mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan.

Asta Program meliputi:

1. Pembangunan Berbasis Reseach dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani dan Jasmani yang Sehat dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

C. Bidang Prioritas

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi ditujukan 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya.
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah wajib memiliki tujuan dan sasaran guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menggambarkan apa yang ingin dicapai, berorientasi lima (5) tahun kedepan untuk mencapai misi dan visi.



Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 adalah:

Tujuan	1 : Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah
Indikator Tujuan	1 : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Target	1 : Baik
Indikator Tujuan	
Sasaran	1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	1 : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Target	1 : B
Indikator Sasaran	
Tujuan	2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Indikator Tujuan	2 : Kapabilitas APIP
Target	2 : Level 3
Indikator Tujuan	
Sasaran	2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	2 : Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP
Target	2 : 100%
Indikator Sasaran	

3.4. Program dan Kegiatan

1. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan.

Disamping pencapaian pada tahun 2023 menjadi catatan penting untuk merumuskan program, juga terdapat beberapa hal yang menentukan dalam merumuskan program dan kegiatan seperti:



- a. Issue strategis
- b. Rumusan program dan kegiatan stakeholder, khususnya BPK dan BPKP
- c. Perkembangan situasi terkini
- d. Ketersediaan anggaran
- e. Pemenuhan MCP.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Tahun anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan direncanakan melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dirancang untuk dapat melaksanakan fungsi penjaminan mutu dan konsultasi bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah:



Tabel 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Th.2026)	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
6	01				Inspektorat			25.493.302.400,00				14.421.992.162,00
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab. Tabanan,	100%	24.435.462.400,00	APBD Kab	100%	13.810.924.693,00
6	01	01	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan,	100%	5.000.000,00		100%	5.000.000,00
6	01	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Tabanan	2 Dok	3.000.000,00		2 Dok	3.000.000,00
6	01	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tabanan	3 Dok	2.000.000,00		3 Dok	2.000.000,00
6	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	21.521.421.600,00		100%	11.730.687.513,00
6	01	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	21.521.421.600,00		100%	11.730.687.513,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM yang bersertifikat	Kab. Tabanan	100%	1.100.000.000,00			100%	300.000.000,00
6	01	01	2.0	095	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Kab. Tabanan	100%	1.100.000.000,00			100%	300.000.000,00
6	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	478.010.800,00			100%	647.667.200,00
6	01	01	2.0	016	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	5.000.000,00			100%	9.110.200,00
6	01	01	2.0	036	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	18.000.000,00			100%	17.100.000,00
6	01	01	2.0	046	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	50.000.000,00			100%	42.168.400,00
6	01	01	2.0	056	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang	Kab. Tabanan	1 Paket	110.000.000,00			1 Paket	104.877.800,00
6	01	01	2.0	066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kab. Tabanan	100%	11.000.000,00			100%	11.400.000,00
6	01	01	2.0	076	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	173.010.800,00			100%	373.010.800,00
6	01	01	2.0	096	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang	Kab. Tabanan	100%	110.000.000,00			100%	80.000.000,00
6	01	01	2.0	106	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	12.000.000,00			100%	10.000.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan	100%	600.000.000,00		100%	81.876.258,00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	600.000.000,00		100%	81.876.258,00
6	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	280.200.000,00		100%	476.673.722,00
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	15.000.000		100%	12.000.000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	60.200.000,00		100%	55.200.000,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	Kab. Tabanan	100%	205.000.000,00		100%	409.473.772,00
6	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	450.830.000,00		100%	569.020.000,00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Tabanan	100%	400.000.000,00		100%	511.364.000,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang I pelihara	Kab. Tabanan	100%	50.830.000,00		100%	57.656.000,00



Kabupaten Tabanan

	6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN	Kab. Tabanan	100%	717.840.000,00	APBD Kab		100%	360.279.907,00
6	01	02	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	547.840.000,00			100%	299.779.907,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	4 LHP	87.040.000,00			4 LHP	66.000.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	12 LHP	130.560.000,00			12 LHP	79.433.540,00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	3 LHP	43.520.000,00			3 LHP	27.500.000,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	4 LHP	65.280.000,00			4 LHP	49.246.367,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kab. Tabanan	12 LHP	130.560.000,00			12 LHP	41.300.000,00
6	01	0	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	1 kesepakatan	90.880.000,00				
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tabanan	12 LHP	21.760.000,00			12 LHP	36.300.000,00
6	01	02	2	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	100%	170.000.000,00			100%	60.500.000,00
6	01	02	2	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab Tabanan	2 LHP	100.000.000,00			2 LHP	27.500.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan	Kab. Tabanan	6 LHP	70.000.000,00			6 LHP	33.000.000,00
		6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PRSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DI LAKSANAKAN	Kab. Tabanan	100%	340.000.000,00	APBD Kab		100%	250.787.562,00
6	01	03	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	15.000.000,00			100%	5.950.200,00
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 Dok	15.000.000,00			2 Dok	5.950.200,00
6	01	03	2	02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	325.000.000,00			100%	244.837.362,00
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Kab. Tabanan	100%	80.000.000,00			100%	82.067.362,00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian, Reformasi Birokrasi urusan pemerintah daerah	Kab. Tabanan	100%	45.000.000,00			100%	41.250.000,00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Kab. Tabanan	100%	200.000.000,00			100%	121.520.000,00



BAB IV

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023. Kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/557/02/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 180/1235/02/HK/2023 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2024.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan jaminan mutu dan konsultasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan dan pengawasan tersebut, maka disusun rencana kegiatan sebagaimana terurai pada tabel 4.1., berikut ini.



Tabel 4.1. Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan T.A.2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
6	01				Inspektorat				25.493.302.400,00
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerahkabupaten/Kota	Kab. Tabanan,	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	24.435.462.400,00
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kab. Tabanan,	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	5.000.000,00
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dok	3.000.000,00
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dok	2.000.000,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	21.521.421.600,00
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	21.521.421.600,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Presentase SDM yang bersertifikat	100%	1.100.000.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tabanan	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	100%	1.100.000.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	478.010.800,00
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabanan	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100%	5.000.000,00
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100%	18.000.000,00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	100%	50.000.000,00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	1 Paket	110.000.000,00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100%	11.000.000,00
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	100%	173.010.800,00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	100%	110.000.000,00
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	100%	12.000.000,00
6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	600.000.000,00
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan	Kab. Tabanan	100%	600.000.000,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	280.200.000,00



				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	15.000.000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	60.200.000,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	205.000.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	450.830.000,00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	100%	400.000.000,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	100%	50.830.000,00
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Tabanan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan		717.840.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	547.840.000,00
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	4 LHP	87.040.000,00
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	12 LHP	130.560.000,00
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	3 LHP	43.520.000,00
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	4 LHP	65.280.000,00
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	12 LHP	130.560.000,00
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen kesepakatan		90.880.000,00
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	12 LHP	21.760.000,00
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	170.000.000,00



6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	2 Dok	100.000.000,00
6	01	02	2.02	02	Penanganan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tabanan	Jumlah LHP yang diterbitkan	6 LHP	70.000.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	100%	340.000.000,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	15.000.000,00
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	2 Dok	15.000.000,00
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	325.000.000,00
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan/asistensi	100%	80.000.000,00
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tabanan	Jumlah perangkat daeran yang dievaluasi	100%	45.000.000,00
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tabanan	Jumlah laporan verifikasi rencana aksi	100%	200.000.000,00



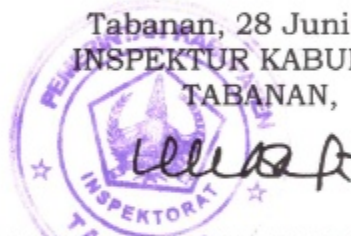
BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan 2025. Disamping itu, Rancangan Akhir Rencana Kerja ini juga disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Inspektorat Kabupaten Tabanan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, kami berharap Renja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2025.

Tabanan, 28 Juni 2024
INSPEKTUR KABUPATEN
TABANAN,



Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJL, M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP.19661030 198610 1 003



Lampiran 1.

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
(Perbub No.:68 Tahun 2021)

